# RENCANA AKSI
## BADAN PENGHUBUNG DAERAH
## PROVINSI BANTEN
## TAHUN 2024

**BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI BANTEN**

Jl. Tebet Timur Raya No. 51, Jakarta Selatan

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia serta ridho-Nya, sehingga dapat disusun Dokumen Rencana Aksi Kinerja Badan Penghubung Badan Penghubung Daerah Provinsi Tahun 2024, telah dapat disusun tepat pada waktunya sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen Rencana Aksi Kinerja disusun sebagai dasar untuk mengevaluasi sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Aksi Kinerja ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai perjanjian kinerja pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten tahun 2024.

Jakarta, 8 Januari 2024

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH**
**PROVINSI BANTEN**

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PENGHUBUNG DAERAH

**IKA SRI ERIKA, S.Sos, M.Si**
NIP. 19690209 200112 2 005

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... i

**DAFTAR ISI** ..... ii

**DAFTAR TABEL** ..... iii

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Maksud dan Tujuan ..... 1

1.3 Sistematika Penulisan ..... 2

**BAB II RENCANA AKSI** ..... 3

2.1 Rencana Strategis ..... 3

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... 7

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) ..... 8

2.4 Rencana Aksi ..... 9

**BAB III PENUTUP** ..... 10

# DAFTAR TABEL


TABEL 2.1 Perubahan Rencana Strategis Badan Penghubung daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026

TABEL 2.2 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Badan Penghubung

TABEL 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2024

TABEL 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Badan Penghubung daerah Provinsi Banten Tahun 2024

TABEL 2.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Badan Penghubung daerah Provinsi Banten Tahun 2024

TABEL 2.6 Rencana Aksi Badan Penghubung daerah Provinsi Banten Tahun 2024

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Dalam siklus manajemen pengelolaan kinerja, dimana komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus saling terkait, berkesinambungan dan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Komponen perencanaan dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah menyusun Rencana Aksi Kinerja sebagai tindaklanjut dari ditetapkannya dokumen Perjanjian Kinerja. Rencana aksi pencapaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 ini memiliki peran yang sangat penting sebagai panduan dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja tahun 2024.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan laporan rencana aksi adalah tersusunnya laporan rencana aksi atas capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan tujuan disusunnya laporan rencana aksi yaitu :

a. Untuk merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2024 secara berkala;

b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
c. Untuk memudahkan dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada Tahun 2024;
d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

## 1.3 SISTEMAKTIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Laporan Rencana Aksi capaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| **Bab I Pendahuluan** | Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan. |
| **Bab II Rencana Aksi** | Menyajikan mengenai Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026, Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan Rencana Aksi. |
| **Bab III Penutup** | Menyajikan penjelasan singkat mengenai peran penting penyusunan rencana aksi |

# BAB II
# RENCANA AKSI

## 2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Tahun 2023-2026 merupakan periode perencanaan pembangunan yang sedikit berbeda, karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2023-2026 bukan merupakan rencana atau janji kepala daerah terpilih. Hal ini disebabkan telah berakhirnya RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024, sesuai amanat Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Pemerintah Provinsi Banten belum mempunyai dokumen RPJMD yang baru.

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah.

Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Banten harus menyusun rencana pembangunan daerah sebagai dokumen perencanaan strategis daerah selama periode tahun 2023-2026.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Dalam periode RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, tahun 2023-2026 merupakan tahun pertama dari RPJMD ke-5, Tahun 2023-2025, yang merupakan tahap modernisasi. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode tersebut ditujukan untuk mencapai Visi dan misi pembangunan dalam RPJPD.

Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, adalah “Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada pada misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan.

Renstra yang memuat visi dan misi Badan Penghubung Daerah Banten merupakan penjabaran atau implementasi sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Badan Penghubung Provinsi Banten, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Untuk mewujudkan misi, dijelaskan dengan tujuan yaitu berisi Pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi selama lima tahun yang didasarkan pada isu-isu analisis strategis, disertakan pula indikator kinerja tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Tahun 2024 merupakan tahun Ke-2 (dua) Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang hubungan antar lembaga yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten 2023-2026)

## Visi

Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten secara keseluruhan mendukung visi Pemerintah Provinsi Banten, yaitu :

**“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA”**

## Misi

1) Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Banten mengemban misi sebagai berikut :
2) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
3) Mewujudkan Perekomomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan
4) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
5) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa.

Dimana Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 mengemban Misi Ke-5 (lima), yaitu :

**"Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa,"**

Dengan tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan Badan Penghubung dan dua Program yang ditempuh dalam sasaran strategis di periode Tahun 2023-2026 sebagai berikut dalam tabel :

**Tabel 2.1**

**Perubahan Rencana Strategis 2023 - 2026**

| **Visi : Banten Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa.** | | | |
|---|---|---|---|
| **Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa** | | | |
| **TUJUAN** | **SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH** | **STRATEGI** | **Arah Kebijakan** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik | Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan | | |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi Pemerintahan Vertikal dan Kementerian/Lembaga Nasional Internasional | Peningkatan Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah |
| | Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik | | |

**Tabel 2.2**

**Tujuan dan Sasaran Pelayanan Badan Penghubung**

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN | SATUAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah | Tercapainya Penyelenggaraan Kinerja Badan Penghubung Daerah Yang Terukur | Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)Badan Penghubung | Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi Pemerintahan Vertikal dan Kementerian/Lembaga Nasional Internasional | Peningkatan Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah | Nilai | 72 | 75 | 78 | 80 | 80 |

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten yang akan digunakan untuk periode tahun 2023-2026 sesuai periode Renstra telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026. Adapun Indikator kinerja Utama (IKU) Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten seperti berikut :

**Tabel 2.3**
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten**
**Tahun 2024**

| NO | TUJUAN | SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH | NAMA INDIKATOR | PENJELASAN INDIKATOR | RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR | SATUAN | TAHUN 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | |
| 1 | Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Provinsi | Kategori Penilaian SAKIP :<br>AA = 90-100 Sangat Memuaskan<br>A = 80-90 Memuaskan<br>BB = 70 - 80 Sangat Baik<br>B = 60 -70 Baik<br>CC = 50 - 60 Cukup<br>C = 30 - 50 Kurang<br>D = 0 -30 Sangat Kurang | Nilai | 85 |
| | | Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik | CAPAIAN PELAYANAN PENGHUBUNG | INDEKS YANG MENGUKUR KESAN ATAUPUN PANDANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL PROGRAM KEGIATAN YANG DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN KUISIONER DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN SKALA LIKERT | TOTAL DARI NILAI PERSEPSI PER UNSUR / TOTAL UNSUR YANG TERISI * NILAI PENIMBANG (SKM UNIT PELAYANAN * 25) | %, INDEKS | 3 |

## 2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mereprensentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**
**Perjanjian Kinerja (Perkin)**
**Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2024**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET |
|---|---|---|---|
| **1.** | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | 85 Nilai |
| **2.** | Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik | Capaian Pelayanan Penghubung | 3 Indeks |

## Tabel 2.5
## Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Badan Penghubung Daerah Tahun 2024

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET TAHUN | PROGRAM | | KEGIATAN<br>SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (Rp.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah** | **Capaian SAKIP Perangkat Daerah** | **85%** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **28.610.000,00** |
| | | | | | 1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 18.000.000,00 |
| | | | | | 2. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | 2.030.000,00 |
| | | | | | 3. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD | 2.030.000,00 |
| | | | | | 4. | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | 2.030.000,00 |
| | | | | | 5. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD | 2.030.000,00 |
| | | | | | 6. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 380.000,00 |
| | | | | | 7. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.110.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **6.875.485.083,00** |
| | | | | | 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.632.865.083,00 |
| | | | | | 2. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 230.600.000,00 |
| | | | | | 3. | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2.946.000,00 |
| | | | | | 4. | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 2.840.000,00 |
| | | | | | 5. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.000.000,00 |
| | | | | | 6. | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 2.234.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **18.540.000,00** |
| | | | | | 1. | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 10.000.000,00 |
| | | | | | 2. | Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan | 8.540.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **1.050.872.538,00** |
| | | | | | 1. | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD | 712.500.000,00 |
| | | | | | 2. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 338.372.538,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **582.259.900,00** |
| | | | | | 1. | Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 14.768.000,00 |
| | | | | | 2. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 85.804.800,00 |
| | | | | | 3. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 22.510.000,00 |
| | | | | | 4. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 34.666.200,00 |
| | | | | | 5. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 31.894.000,00 |
| | | | | | 6. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 391.856.900,00 |
| | | | | | 7. | Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD | 760.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah** | **1.279.551.900,00** |
| | | | | | 1. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 211.500.000,00 |
| | | | | | 2. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.068.051.900,00 |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET TAHUN | PROGRAM | | KEGIATAN & SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (Rp.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.** | **Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik** | **Capaian Pelayanan Penghubung** | **3 Indeks** | **Program Pelayanan Penghubung** | | **Pelaksanaan Pelayanan Penghubung** | **1.621.477.489,00** |
| | | | | | 1. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat | 470.285.525,00 |
| | | | | | 2. | Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat | 236.458.685,00 |
| | | | | | 3. | Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | 533.538.100,00 |
| | | | | | 4. | Kegiatan Fasiitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | 266.212.600,00 |
| | | | | | 5. | Koordinasi dan Sinkronisasi  Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | 114.982.579,00 |
| | | | | | | | |

## 2.4 RENCANA AKSI

Rencana Aksi Badan Penghubung Daerah Provinsi BantenTahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2024. Adapun Rencana Aksi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## Tabel 2.6
## Rencana Aksi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2024

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET TAHUN | PROGRAM | | KEGIATAN<br>SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (Rp.) | TRIWULAN I | | | TRIWULAN II | | | TRIWULAN III | | | TRIWULAN IV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | 85% | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **28.610.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 18.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | 2.030.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD | 2.030.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4. | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | 2.030.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD | 2.030.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 380.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.110.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **6.875.485.083,00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.632.865.083,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 230.600.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3. | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2.946.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4. | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 2.840.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6. | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 2.234.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **18.540.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1. | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 10.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. | Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan | 8.540.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **1.050.872.538,00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1. | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD | 712.500.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 338.372.538,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **582.259.900,00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1. | Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 14.768.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 85.804.800,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 22.510.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 34.666.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 31.894.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 391.856.900,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7. | Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD | 760.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah** | **1.279.551.900,00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 211.500.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.068.051.900,00 | | | | | | | | | | | | |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET TAHUN | PROGRAM | | KEGIATAN SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (Rp.) | TRIWULAN I | | | TRIWULAN II | | | TRIWULAN III | | | TRIWULAN IV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
| **2.** | **Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik** | **Capaian Pelayanan Penghubung** | **3 Indeks** | **Program Pelayanan Penghubung** | | **Pelaksanaan Pelayanan Penghubung** | **1.621.477.489,00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat | 470.285.525,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. | Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat | 236.458.685,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3. | Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | 533.538.100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4. | Kegiatan Fasiitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | 266.212.600,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | 114.982.579,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# BAB III
# PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Kinerja merupakan dokumen yang berisikan jadwal rencana pelaksanaan perjanjian kinerja yang menyangkut sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator dan target yang ditetapkan sesuai anggaran yang telah disetujui.

Rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2024 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2024, serta sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja sangat tergantung dari tingkat kematangan dalam penyusunan perencanaan. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari alternatif terhadap langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta dapat mengantisipasi adanya permasalahan/ faktor penghambat yang timbul. Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan

Jakarta, 8 Januari 2024

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PENGHUBUNG DAERAH

IKA SRI ERIKA, S.Sos, M.Si
NIP. 19690209 200112 2 005